
**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP
PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI EMPIRIS PADA DESA SE-KECAMATAN JAYAPURA
SELATAN)**

Theresia Mina Rumsowek¹, Loggar Bhilawa²

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: theresia.rumsowek2001@gmail.com¹, loggarbhilawa@unesa.ac.id²

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini didorong oleh permasalahan pengelolaan dana desa yang sering kali terhambat oleh kurangnya akuntabilitas dan transparansi, yang menyebabkan penyalahgunaan dana desa, seperti kasus korupsi dan pengalokasian dana yang tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Jayapura Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei, serta teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan terdiri dari 59 aparatur kelurahan dan desa di Kecamatan Jayapura Selatan. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana, serta mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi melalui pelatihan aparat desa, penguatan pengawasan, serta penerapan mekanisme yang lebih transparan dalam penggunaan dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan dana desa yang lebih baik dan akuntabel.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengelolaan dana desa

ABSTRACT

The background of this study is driven by the problem of village fund management, which is often hindered by a lack of accountability and transparency, resulting in the misuse of village funds, including instances of corruption and the improper allocation of funds. This study aims to analyze the effect of accountability and transparency on village fund management in South Jayapura District. This study employs a quantitative method, utilizing a survey approach and a purposive sampling technique. The sample used consisted of 59 village and sub-district officials in South Jayapura District. Data analysis was conducted using the SPSS 24 application and multiple linear regression. The study's results showed that accountability and transparency had a significant positive impact on village fund management. This finding suggests that enhancing accountability and transparency in village fund management can improve the effectiveness and efficiency of fund management, while also reducing the likelihood of fund misuse. The implications of this study underscore the importance of enhancing accountability and transparency by training village officials, strengthening supervision, and implementing more transparent mechanisms for the utilization of village funds. This research is expected to contribute to the development of more effective and accountable village fund management policies and practices.

Keywords: *Accountability, transparency, village fund management*

PENDAHULUAN

Kajian terhadap UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat menarik untuk dilakukan karena diharapkan dapat mendorong otonomi desa dan mempercepat pembangunan. Pembangunan desa dapat memberikan kontribusi pada aspek pemerataan pembangunan, sehingga menjadi aspek yang krusial dan strategis dalam upaya pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan Desa juga berperan penting dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat desa karena dapat memenuhi kepentingan sebagian besar masyarakat pedesaan secara langsung. Penerapan otonomi bagi desa dapat memberikan kekuatan pada Pemerintah desa, walaupun Pemerintah desa telah dijalankan secara mandiri, Pemerintah pusat dan Daerah tetap berperan aktif dalam menjalankan pembinaan, pengawasan terhadap Pemerintah desa, dan juga mendukung pelaksanaan program-program yang direncanakan oleh Pemerintah desa. Maka, bentuk dukungan Pemerintah pusat adalah melalui kebijakan pemberian dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada setiap desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 menyatakan bahwa “Dana Desa merupakan bagian dari dana Transfer ke Daerah yang diperuntukan secara khusus bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pembiayaan kegiatan Pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”. Dalam rangka pengurangan jumlah dana idle di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Pemerintah pusat mengubah regulasi pada penyaluran dana desa yaitu dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung masuk kepada Rekening Kas Desa (RKD) per Januari 2020. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mempercepat penggunaan dana desa (Tirande et al., 2022).

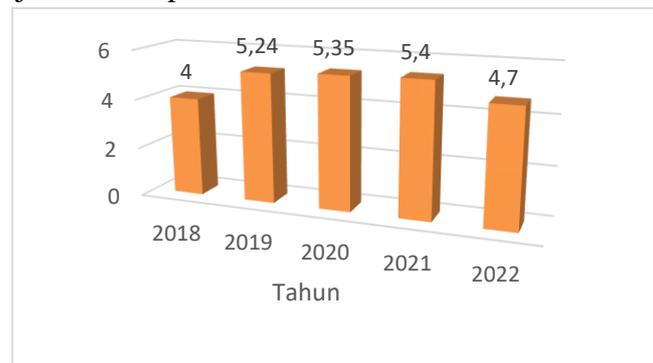


Gambar 1. ADD Tahun 2018-2023

Sumber : Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2022)

Gambar 1. memperlihatkan Dana Desa yang di anggarkan oleh Pemerintah pusat pada tahun 2018 sejumlah Rp. 60 triliun. Kemudian pada tahun 2019, terjadi peningkatan sejumlah 16,67% atau sejumlah Rp. 70 triliun. Pada tahun 2020 anggaran dana desa sejumlah Rp. 72 triliun, dapat dilihat bahwa mengalami kenaikan 2,86% dari tahun sebelumnya. Dana desa pada tahun 2021 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2022 terjadi penurunan sejumlah 5,56% atau sejumlah Rp. 68 triliun. Tahun 2023 dana desa mengalami kenaikan sebesar 2,94% atau sebesar Rp. 70 triliun. Dana tersebut merupakan dana yang

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah desa untuk pembangunan fisik maupun non fisik yang mendukung tujuan utama pemerintah.



Tabel 1. ADD Provinsi Papua Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

Sumber : Data Diproses Oleh Penulis (2023)

Papua, salah satu Provinsi di Timur Indonesia, tengah mencuri perhatian dengan anggaran dana desa yang fantastis. Seperti yang terlihat pada tabel 1.1 ditunjukkan bahwa tahun 2018, Provinsi Papua mendapat Rp. 4 triliun untuk dana desa, disusul dengan angka Rp. 5,24 triliun pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 menjadi Rp. 5,35 triliun, pada tahun 2021 Rp. 5,4 triliun dan untuk tahun 2022, Provinsi Papua mendapat anggaran sebesar Rp. 4,7 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2018)(Bams, 2020) (Kementerian Desa, 2023).

Kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, juga tak kalah mendapat perhatian dengan menerima anggaran dana desa yang tidak sedikit. Pada tahun 2018, anggaran dana desa yang didapatkan kota Jayapura sejumlah Rp. 104 miliar, yang kemudian dibagi ke 14 desa. Setiap desa menerima alokasi dana antara Rp. 1,2 hingga Rp. 2 miliar. Tahun 2020 anggaran yang diterima setiap desa di kota Jayapura sebesar Rp. 5 sampai Rp. 11 miliar, jumlah yang tergolong banyak. Dana desa yang dianggarkan oleh Pemerintah pusat mengalami variasi kenaikan dan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan alokasi dana desa yang fantastis ini, diharapkan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah desa.

Realitanya masih terdapat banyak permasalahan terkait dana desa di Indonesia dimana Pemerintah desa tidak mematuhi UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola keuangannya. Hal ini terlihat jelas dari persoalan yang muncul pada salah satu desa di Sumatera Utara yakni Desa Mainu Tengah terkait mantan Kepala Desa yang terkena kasus korupsi dana desa, dengan terbukti melakukan penyalahgunaan dana desa yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp. 394 juta. Masalah terkait dana desa juga terjadi di salah satu desa di Kota Jayapura tepatnya di Desa Koya Koso. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP, mengungkap bahwa adanya korupsi dana desa yang aparat desa lakukan tersebut dengan modus menciptakan pekerjaan fiktif. Dari kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,4 miliar. Selanjutnya, permasalahan yang menjadi fokus penelitian penulis terletak di Kecamatan Jayapura Selatan. Dimana di salah satu kelurahan yaitu, kelurahan Entrop terdapat permasalahan terkait infrastruktur jalan yang rusak dan tidak ada penyelesaiannya hingga saat ini. Padahal telah ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2022 Pemerintah Kota Jayapura terkait perencanaan infrastruktur dalam skala kota.

Hal tersebut serupa dengan beberapa teori yang akan digunakan, yakni teori keagenan dan teori stakeholder untuk mengungkap fenomena yang terjadi berdasarkan hubungan pemerintah pusat sebagai prinsipal yang memberikan wewenang kepada pemerintah desa sebagai agen pengelolaan dana desa yang diberikan secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, teori keagenan akan membantu dalam memahami dinamika hubungan antara prinsipal (pemerintah pusat) dan agen (pemerintah desa), serta bagaimana insentif dan kontrol dapat diterapkan untuk memastikan pengelolaan dana dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi yang optimal. Sementara itu, teori stakeholder akan memperjelas peran serta dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat, salah satunya yaitu pemerintah desa sebagai pihak yang mengontrol serta mempunyai tanggung jawab untuk pengelolaan dana desa. Dengan demikian, kedua teori ini akan membantu dalam menganalisis interaksi antara pemerintah desa dan pemerintah pusat, serta mencari tahu pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam konteks pengelolaan dana desa (Maria et al., 2021).

Pemerintah perlu melakukan upaya yang lebih baik dalam menerapkan konsep manajemen publik yang baik mengingat semakin banyaknya kasus penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Ada dua prinsip utama dalam manajemen publik yang efektif, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh sejumlah lembaga sektor publik yang wajib untuk fokus pada pertanggungjawaban horizontal terhadap masyarakat sebagai bagian dari kewajiban mereka, selain dari bertanggung jawab secara vertikal kepada otoritas yang lebih tinggi (Angelia, 2020).

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang “Transparency and Accountability of a Village Fund Management During COVID-19 Crisis” yang dilakukan oleh (Aisyaturrahmi et al., 2021), yang berlokasi di salah satu desa di Jawa Timur. Beberapa temuan yang dapat disoroti yaitu dampak krisis COVID-19, kurangnya transparansi, dan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sewaktu krisis COVID-19 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Menurut Andriani, (2019) melakukan penelitian yang sama dengan mengangkat judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa”. Temuan penelitian ini memberitahukan bahwasanya transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Topik berikut ini masih berfokus pada hal yang sama seperti penelitian sebelumnya, yaitu mengenai “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa” yang diteliti oleh Maina et al., (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Namun, hasil Transparansi dan Partisipasi Masyarakat tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Temuan hasil Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam penelitian ini berbeda dengan temuan yang diperoleh Aisyaturrahmi et al. (2021), Gunawan (2016), Andriani (2019) yang mana Akuntabilitas tidak menimbulkan pengaruh bagi pengelolaan dana desa, tetapi pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya, Penelitian telah mengkaji tentang pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa namun, masih terdapat inkonsistensi dalam temuan-temuan hasil penelitian tersebut. Penelitian ini akan diimplementasikan pada desa se-Kecamatan Jayapura Selatan. Pemilihan desa se-Kecamatan Jayapura Selatan sebagai lokasi penelitian dikarenakan terdapat sejumlah alasan yang menjadi dasar utama yaitu, yang pertama terdapat permasalahan di dua desa, dimana adanya infrastruktur jalan yang rusak dan jembatan yang menghubungkan antar rumah warga tidak memadai dan tidak ada penyelesaiannya hingga saat ini. Alasan yang kedua yaitu, seluruh desa yang ada di Kecamatan Jayapura Selatan merupakan lokasi yang belum pernah diteliti sebelumnya sehingga informasi dan data spesifik dari seluruh desa relatif belum pernah di eksplorasi secara mendalam, sehingga penelitian ini diharapkan bisa melengkapi kekosongan dalam literatur dan menyajikan perspektif baru.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian memakai metode kuantitatif pada penelitian ini. Penelitian dengan metode kuantitatif mewajibkan penggunaan data numerik dalam seluruh tahapan, dari awal proses pengumpulan sampai penafsiran hasil. Persentasi hasil penelitian melalui gambar, tabel, grafik, atau format visual lain yang representatif dapat meningkatkan pemahaman pembaca serta mempermudah transfer informasi (Priadana and Sunarsi, 2021).

Jenis dan Sumber Data

Data pada penelitian ini rencananya akan menggunakan data primer. Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilangsungkan dengan metode kuesioner yang diberikan pada responden yang sudah ditentukan sebagai sampel dan diperkuat dengan metode deep interview untuk mendapatkan jawaban diluar pertanyaan kuesioner yang dapat memberikan penguatan hasil penelitian. Sumber data berasal dari jawaban yang diberikan oleh aparat desa yang ada pada desa se-Kecamatan Jayapura Selatan lewat pernyataan yang diberikan melalui kuesioner maupun jawaban yang diberikan diluar pernyataan kuesioner tersebut.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini mencakup aparat kelurahan dan aparat desa di Kecamatan Jayapura Selatan yang berjumlah 69 orang, yang mencakupi 2 desa dan 5 Kelurahan (Pemerintah Provinsi Papua, 2022). Penelitian ini akan menerapkan rumus Slovin untuk mendapatkan jumlah sampel.

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel yang akan diteliti

N = jumlah populasi

e = *margin of eror*

Menurut Sugiyono, (2013) mengatakan bahwa jika sampel yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, maka tingkat kesalahan akan semakin tinggi. Sedangkan sebaliknya jika jumlah sampel yang dibutuhkan banyak, maka akan semakin rendahnya tingkat kesalahan. Oleh sebab itu *margin of error* yang ditetapkan, yaitu sebesar 5%. Berikut jika diterapkan ke dalam rumus Slovin:

$$n = \frac{69}{1 + (69 \times 0,05^2)}$$

$$n = \frac{69}{1,1725}$$

$$n = 59$$

Maka, didapatkan jumlah sampel yang akan penelitian ini gunakan yaitu sejumlah 59 sampel. Teknik *purposive sampling* menjadi tekni pengambilan sampel yang peneliti gunakan. Salah satu metode untuk memilih sampel penelitian yang mempertimbangkan kriteria atau aspek tertentu adalah teknik *purposive sampling*. Metode ini dilakukan supaya data yang dikumpulkan dapat akurat mempresentasikan populasi secara keseluruhan (Susana & Setianto, 2018). Kriteria yang akan menjadi acuan dalam pemilihan sampel adalah aparat desa yang memahami akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan dana desa.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti melaksanakan pengumpulan data dengan metode kuesioner yang akan disebarakan kepada responden yang sudah ditentukan sebagai sampel dan diperkuat dengan metode *deep interview* (Vratiwy, 2019). Kuesioner pada penelitian ini menyediakan jawaban alternatif dalam pernyataan-pernyataan yang disediakan. Instrumen skala *Likert* adalah instrumen yang diterapkan pada skala interval ini. Biasanya, skala ini terdiri dari serangkaian pernyataan yang diikuti oleh pilihan tanggapan berjenjang, yang memungkinkan responden menunjukkan tingkat persetujuan mereka, seperti dari "sangat tidak setuju", "tidak setuju", "netral", "setuju", dan "sangat setuju". Tanggapan ini sering diwakili oleh skala numerik, seperti 1 untuk "sangat tidak setuju" hingga 5 untuk "sangat setuju". Dengan demikian, skala *Likert* memungkinkan peneliti mengukur intensitas pandangan atau perasaan responden terhadap suatu topik secara kuantitatif (Sugiyono, 2007).

Teknik Analisis Data

Langkah yang akan dilakukan selanjutnya dalam menganalisis data, yaitu :

1. Analisis Statistik Deskriptif
2. Uji Instrumen Kuesioner
3. Uji Asumsi Klasik
4. Uji Regresi Linier Berganda
5. Uji Parsial atau Uji t
6. Uji Simultan atau Uji F
7. Uji Koefisien Determinasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan deskripsi terkait semua variabel yakni variabel independen yakni akuntabilitas dan transparansi serta variabel dependen yaitu variabel pengelolaan dana desa.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	14,00	25,00	20,2034	2,59827
Transparansi	11,00	25,00	17,9831	3,24033
Pengelolaan Dana Desa	11,00	25,00	19,3220	2,87942

Sumber: Hasil olah data SPSS 24

Tabel 1. Gambaran statistik deskriptif untuk variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengelolaan Dana Desa. Untuk variabel Akuntabilitas, nilai minimum yang diperoleh adalah 14, sedangkan nilai maksimum adalah 25, dengan rata-rata (mean) sebesar 20,2034 dan standar deviasi 2,59827. Variabel Transparansi menunjukkan nilai minimum 11 dan nilai maksimum 25, dengan rata-rata 17,9831 dan standar deviasi 3,24033. sementara itu, variabel Pengelolaan Dana Desa menghasilkan nilai minimum 11 dan maksimum 25, dengan rata-rata 19,3220 dan standar deviasi 2,87942. Data ini menunjukkan bahwa ada variasi dalam tanggapan responden terhadap masing-masing variabel yang diukur.

2. Hasil Uji Validitas

Selepas memperoleh data yang dikumpulkan dari 59 responden lewat kuesioner, dilanjutkan dengan menguji apakah kuesioner tersebut valid atau tidak valid. Proses ini dikenal sebagai uji validitas. Uji validitas ini penting dilaksanakan untuk memastikan bahwasanya kuesioner benar-benar bisa memperkirakan variabel yang dimaksud dalam penelitian. Dalam pengujian validitas, dilakukan uji signifikansi untuk membandingkan nilai korelasi yang didapatkan dari perhitungan (r hitung) dengan nilai korelasi yang diambil dari tabel statistik (r tabel). Apabila r hitung melampaui r tabel, maka item dalam kuesioner dianggap valid, yang berarti item tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel yang diukur. Sebaliknya, apabila r hitung dibawah r tabel, item tersebut dianggap tidak valid. Proses ini membantu peneliti memastikan bahwasanya data yang dihasilkan dari kuesioner ialah akurat dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Data

Pernyataan	r hitung	r tabel	Sig. (2-tailed)	Keputusan
X1.1	0,663	0,252	0,000	Valid
X1.2	0,673	0,252	0,000	Valid
X1.3	0,656	0,252	0,000	Valid
X1.4	0,658	0,252	0,000	Valid
X1.5	0,558	0,252	0,000	Valid
X2.1	0,782	0,252	0,000	Valid
X2.2	0,550	0,252	0,000	Valid

X2.3	0,823	0,252	0,000	Valid
X2.4	0,812	0,252	0,000	Valid
X2.5	0,592	0,252	0,000	Valid
Y1	0,795	0,252	0,000	Valid
Y2	0,653	0,252	0,000	Valid
Y3	0,818	0,252	0,000	Valid
Y4	0,759	0,252	0,000	Valid
Y5	0,631	0,252	0,000	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS 24

Tabel 2. Semua pernyataan yang digunakan dalam pengukuran variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Pengelolaan Dana Desa (Y) pada desa se-Kecamatan Jayapura Selatan dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai r hitung melampaui r tabel (0,252) dan nilai signifikansi dibawah 0,05.

3. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini juga memanfaatkan program SPSS. Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk memastikan keandalan jawaban yang responden berikan terhadap pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner. Metode statistik Cronbach Alpha digunakan dalam uji reliabilitas penelitian ini, di mana diperlukan nilai α yang melampaui 0,7.

Tabel 3. Hasil Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	59	100.0
	Excluded ^a	0	0
Total		59	100.0

Sumber: Hasil olah data SPSS 24

Pada tabel 3, bisa dilihat bahwasanya jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 59, yang berarti 100% dari responden tersebut valid. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya seluruh responden tersebut valid dan tidak ada yang termasuk dalam baris yang dikecualikan.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Nama Variabel	Jumlah Pernyataan	Cronbach's Alpha	Status
Akuntabilitas (X1)	5	0,739	Reliabel
Transparansi (X2)	5	0,758	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa (Y)	5	0,772	Reliabel

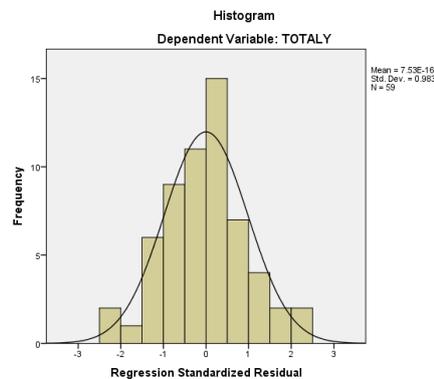
Sumber: Hasil olah data SPSS 24

Pada tabel 4. dapat ditelaah bahwasanya masing-masing variabel memiliki 5 pernyataan yang mana hasil dari variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa item dari setiap pernyataan tersebut reliabel, atau bisa diperhatikan seluruh nilai Cronbach's Alpha pada ketiga variabel tersebut melampaui 0,7. Artinya instrumen yang penelitian ini gunakan bisa dipercaya dalam mengukur variabel-variabel tersebut.

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

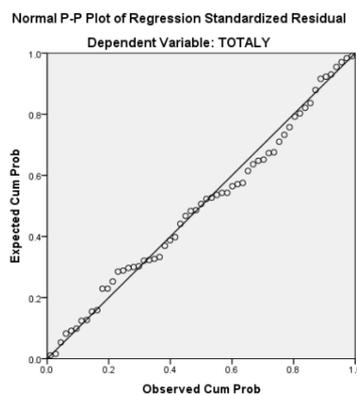
Metode yang umum digunakan untuk uji normalitas yaitu uji Kolmogrov-Smirnov dan uji P-plot.



Gambar 1. Hasil Histogram

Sumber: Hasil olah data SPSS 24

Histogram yang bisa dilihat pada gambar 1 tersebut merupakan uji normalitas yang dilaksanakan untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Pada grafik histogram bisa dilihat garis yang melengkung ke atas seperti gunung, serta terlihat sempurna dengan sisi kanan dan kiri yang simetris, maka bisa disimpulkan bahwasanya data pada penelitian ini terdistribusi normal.



Gambar 2. P-Plot Normalitas

Sumber: Hasil olah data SPSS 24

Gambar 2. memperlihatkan hasil Uji P-plot normalitas. Dari gambar tersebut, garis diagonal dikelilingi oleh titik yang berdekatan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya data penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		59
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	
	Std. Deviation	.0000000
Most Extreme Differences	Absolute	2,51552179
	Positive	.068
	Negative	-.061
Test Statistic		.068

Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}
------------------------	---------------------

Sumber: Hasil olah data SPSS 24

Pada saat akan memastikan apakah data terdistribusi normal atau tidak, hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov harus memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Jadi, apabila nilai signifikansinya $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwasanya data tersebut tidak terdistribusi normal. Terlihat dalam tabel 5 nilai signifikansi (2-tailed) sejumlah 0,200, yang mana $0,200 > 0,05$. Jadi, bisa dibuat kesimpulan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Kriteria dalam mengukur nilai Tolerance yaitu harus melampaui 0,1 dan nilai VIF harus dibawah 10, agar dapat dikatakan tidak adanya multikolinearitas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
1 (constant)		
Akuntabilitas	0,919	1,088
Transparansi	0,919	1,088

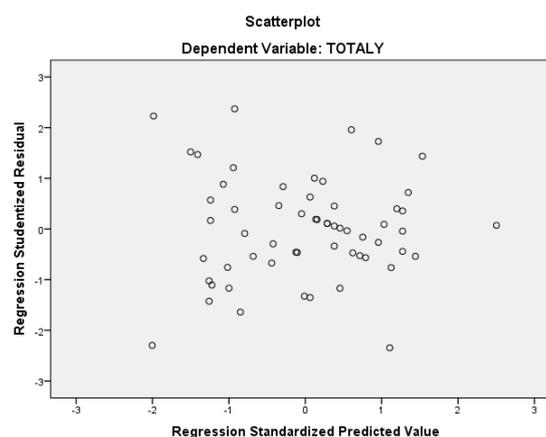
a. Dependent Variable : Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Hasil olah data SPSS 24

Dengan didasarkan hasil uji multikolinearitas dalam tabel 4.6 terlihat bahwasanya nilai tolerance value variabel Akuntabilitas dan variabel Transparansi sejumlah $0,919 > 0,1$ dan nilai VIF sejumlah $1,088 < 10$, dengan demikian bisa dibuat Kesimpulan bahwasanya tidak terjadi multikolinearitas.

a. Uji Heteroskedastisitas

Pada uji heteroskedastisitas seringkali dilakukan untuk mengetahui apakah variasi kesalahan atau Apabila dalam gambar scatterplot terlihat adanya titik-titik yang tersebar dan tidak terbentuk seperti sebuah pola yang bergelombang, serta tidak terkumpul pada satu titik saja, maka bisa dibuat Kesimpulan bahwasanya tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil olah data SPSS 24

Hasil uji heteroskedastisitas yang terdapat pada gambar scatterplot 4.3, bisa diperhatikan titik-titik yang tersebar secara acak, serta tidak membentuk sebuah pola tertentu, dan tidak membentuk sebuah pola yang bergelombang. Maka, bisa dibuat kesimpulan

bahwasanya tidak adanya heteroskedastisitas dalam data tersebut, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi dan model regresi dapat diandalkan.

5. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Metode ini bertujuan untuk melihat korelasi antar variabel yang diteliti. Adapun hasil dari analisis ini dipaparkan pada tabel di bawah:

Tabel 7. Hasil Analisis Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	9,481	3,885		3,941	0,000
	Akuntabilitas	0,460	0,136	0,412	3,471	0,002
	Transparansi	0,394	0,107	0,442	3,727	0,000

Sumber: Hasil olah data SPSS 24

Dalam perhitungan yang terdapat pada tabel 4.7, diketahui persamaan regresi linier berganda seperti dibawah ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon$$

$$Y = 9,481 + 0,460 + 0,394$$

Keterangan:

- Y = variabel terikat yang ingin diprediksi
- β_0 = konstanta dari persamaan regresi
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ = koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat Y
- ε = kesalahan acak yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model

Berikut ini interpretasi dari hasil persamaan yang telah didapat:

a. Konstanta

Nilai konstanta 9,481 menunjukkan bahwa jika nilai akuntabilitas dan Transparansi adalah 0, maka nilai dasar pengelolaan dana desa adalah 9,481. Ini adalah nilai pengelolaan dana desa ketika tidak ada pengaruh dari akuntabilitas dan transparansi

b. Akuntabilitas

Variabel Akuntabilitas pada persamaan regresi tersebut mempunyai nilai koefisien regresi sejumlah 0,460. Nilai ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel-variabel tersebut. Artinya, jika variabel lain tetap konstan, maka nilai variabel pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,460 untuk setiap peningkatan satu satuan pada variabel akuntabilitas.

c. Transparansi

Variabel Transparansi pada persamaan regresi tersebut mempunyai nilai koefisien regresi yaitu 0,394. Nilai ini menunjukkan adanya pengaruh positif dari setiap variabel-variabel tersebut. Dengan kata lain, jika variabel lain konstan, maka nilai variabel pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,394 untuk tiap peningkatan satu satuan pada variabel transparansi.

1) Uji T

Uji parsial mengukur besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dan memastikan signifikansi dari hasil temuan. Variabel independen dan variabel dependen dipengaruhi ketika nilai signifikansi dibawah 0,05. Dinyatakan terdapat pengaruh ketika nilai signifikansi < 0.05 dan berlaku sebaliknya. Selain itu, dengan melihat perbandingan

t hitung > t tabel dinyatakan terdapat pengaruh. Nilai t tabel bisa dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$t \text{ tabel} = t (a/2 ; n-k-1)$$

$$t \text{ tabel} = 0,025 ; 59 - 2 - 1$$

$$t \text{ tabel} = 0,025 ; 56$$

$$t \text{ tabel} = 2,003$$

Terlihat dalam tabel 7. hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan nilai t hitung yaitu sebesar 3,471 yang melebihi nilai t tabel yaitu 2,003. Serta nilai signifikansi pengaruh variabel Akuntabilitas terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa yakni sejumlah 0,002 yang kurang dari nilai ambang signifikansi 0,05. Dengan didasarkan temuan analisis tersebut, bisa dibuat kesimpulan bahwasanya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Akuntabilitas terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa. Kemudian untuk variabel Transparansi dalam tabel 4.7, menunjukkan nilai t hitung sejumlah 3,727, yang melampaui nilai t tabel yaitu sejumlah 2,003. Selain itu, nilai signifikansi sejumlah 0,000 yang lebih rendah dari nilai ambang signifikansi 0,05. Dari analisis ini, bisa dibuat kesimpulan bahwasanya ada pengaruh yang signifikan dari variabel Transparansi terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa.

2) Uji F

Tujuan uji F adalah memastikan terdapat pengaruh secara bersamaan dari keseluruhan variabel independen bagi variabel dependen yang ditentukan dengan nilai signifikansi < 0.05 dan f hitung > f tabel untuk mencari nilai F tabel, maka dapat menerapkan rumus dibawah ini:

$$F \text{ tabel} = N - k - 1$$

$$F \text{ tabel} = 59 - 2 - 1$$

$$F \text{ tabel} = 56$$

Didapatkan pada F tabel nilai 56 menunjukkan angka sebesar 3,16. Sehingga, didapatkan nilai F tabel sebesar 3,16.

Tabel 8. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Squares	F	Sig.
Regression	113.866	2	56.933	8,687	0,001 ^b
Residual	367.015	56	6.554		
Total	480.881	58			

Sumber: Hasil olah data SPSS 24

Dari tabel 4. Jumlah F hitung sebesar 8,687 melampaui angka F tabel yakni sejumlah 3,16 dan jumlah nilai signifikansinya 0,001, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05. Dari hasil yang didapatkan ini, bisa dibuat kesimpulan bahwasanya variabel Akuntabilitas dan variabel Transparansi keduanya berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa.

6. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ialah sebuah instrumen evaluasi yang dipergunakan untuk mengeksplorasi sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui pemeriksaan R square.

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinan

Model	R	R square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,487 ^a	0,237	0,210	2,56005

Sumber: Hasil olah data SPSS 24

Hasil yang ditemukan pada tabel 9. menunjukkan nilai R square sejumlah 0,210 atau sejumlah 21%. Jadi, bisa dibuat kesimpulan bahwasanya secara simultan besarnya pengaruh variabel Akuntabilitas dan variabel Transparansi terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,210 (21%).

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Dengan didasarkan temuan penelitian yang sudah didapatkan, Akuntabilitas terbukti berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa, penelitian ini memperkuat grand teori yang diterapkan, yaitu teori Keagenan dan teori Stakeholder. Teori Keagenan menguraikan hubungan antara prinsipal (pemerintah pusat) dan agen (pemerintah desa), di mana agen harus bertanggungjawab kepada prinsipal dalam Pengelolaan Dana Desa. Prinsipal memiliki otoritas untuk membuat keputusan dan memberikan tanggung jawab kepada agen, sehingga agen harus mengelola dana desa dengan Akuntabilitas tinggi untuk memenuhi harapan prinsipal. Terkait dengan teori Stakeholder, suatu entitas atau dalam hal ini pemerintah desa harus memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah desa sendiri namun juga kepada semua pihak yang berkepentingan. Dengan memahami dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat, pemerintah desa sebagai Stakeholder utama dapat meningkatkan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga sektor publik, seperti pemerintah desa harus memperhatikan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara horizontal, sebagai bagian dari tanggung jawab agen, selain dari kewajiban untuk bertanggungjawab secara vertikal kepada pemerintah pusat. Akuntabilitas yang kuat pada Pengelolaan Dana Desa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, membantu menjaga integritas pengelolaan dana desa, dan mencegah penyalahgunaan dana desa.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian sebelumnya dari (Wafirotin et al., 2019), yang mana didapati Akuntabilitas memberikan pengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa. Kemudian, Putri, (2022) juga memberitahukan bahwasanya Akuntabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya, Amleni et al., (2022) juga mendapatkan hasil penelitian serupa yang menemukan bahwasanya Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Hasil temuan ini mencerminkan bahwa Akuntabilitas merupakan salah satu indikator kunci dalam keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. Dengan penerapan Akuntabilitas yang baik, potensi penyalahgunaan dana desa dapat dicegah secara efektif, serta meminimalkan peluang terjadinya praktik korupsi. Akuntabilitas yang tinggi memastikan bahwa Pengelolaan Dana Desa dilakukan secara bertanggung jawab, sehingga dana tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, Akuntabilitas tidak hanya menjaga integritas pengelolaan keuangan desa, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Penelitian ini telah menemukan hasil bahwasanya Transparansi secara positif berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa, hal ini sejalan dengan grand teori yang diterapkan, yakni teori Keagenan dan teori Stakeholder. Dalam konteks ini, pemerintah desa diposisikan sebagai agen yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai prinsipal. Teori Stakeholder juga relevan karena menggambarkan hubungan antara kelompok atau individu yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas dan keberadaan suatu entitas, dalam hal ini adalah pemerintah desa, pemerintah pusat, dan masyarakat. Stakeholder (pemerintah desa) memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi yang jelas dan jujur kepada masyarakat serta pemerintah pusat atau Transparansi, karena pemerintah desa bertanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan oleh pemerintah pusat dan masyarakat. Transparansi ini sangat penting karena dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pemerintah desa dengan memastikan bahwa Pengelolaan Dana Desa dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh pemerintah pusat dan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian yang memperlihatkan bahwasanya Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa mendukung teori Keagenan dan teori Stakeholder, menekankan pentingnya Transparansi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Temuan hasil yang telah diperoleh tersebut sangat relevan dengan hasil yang didapat oleh S Temalagi, (2022), yaitu Transparansi terbukti menimbulkan pengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa. Fahisa & Afriyenti, (2023) juga mendapatkan hasil yang sama, yaitu Transparansi menimbulkan pengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa. Berikutnya Susbiyani, Afifah et al. (2023) menemukan hasil bahwa Transparansi memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan seluruh hasil yang telah diuraikan tersebut, dapat ditelaah bahwasannya Transparansi merupakan suatu faktor kunci yang sangat penting dalam Pengelolaan Dana Desa. Dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai Pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa dapat memastikan bahwa sumber daya yang dipercayakan kepada masyarakat dikelola secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas dan transparansi bukan hanya menjadi aspek penting, tetapi juga merupakan kunci untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Implementasi yang baik dari kedua prinsip ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan dana desa. Untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam pendidikan dan pelatihan bagi aparat desa mengenai manajemen keuangan yang baik serta penerapan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan mengenai akuntabilitas dan transparansi bagi aparat desa, serta penguatan regulasi yang mendukung akselerasi pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien.

REFERENSI

- Afifah, D. N., Susbiyani, A., & Kamelia F. A, I. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. *Jrak (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 9(1), 161–170. <https://doi.org/10.38204/jrak.v9i1.1044>
- Aisyaturrahmi, A., Nuswantara, D. A., Prastiwi, D., Bhilawa, L., & Md Daud, S. A. M. (2021). Transparency And Accountability Of A Village Fund Management During Covid-19 Crisis. *International Journal Of Service Management And Sustainability*, 6(2), 189. <https://doi.org/10.24191/ijsms.v6i2.15580>
- Amleni, W., Mentu, H., & Lake, Y. (2022). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 1(1), 30–36. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v1i1.9>
- Angelia, R. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Cianjur Tahun. ..*Telkomuniversity.Ac.Idrs Angelia, S Rahayueproceedings Of Management, 2020*•... *Telkomuniversity.Ac.Id*. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/11589>
- Arl Putri. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal.Ikopin.Ac.Idarl Putrifair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 2022*•*Journal.Ikopin.Ac.Id*. <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1003>
- Bams. (2020). *Realisasi Penyaluran Dana Desa Di Papua Masih Rendah*. Pasific Pos.Com. <https://doi.org/https://www.pasificpos.com/realisasi-penyaluran-dana-desa-di-papua-masih-rendah/>
- Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris Pada Nagari Di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 745–757. <https://doi.org/10.24036/Jea.v5i2.694>
- Kementerian Desa. (2023). *Dana Desa*. Sistem Informasi Desa.
- Kementrian Keuangan Ri. (2018). *Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Apbn T.A. 2018*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
- Maina, N., Subarkah, J., & Pravasanti, Y. A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Se- Kecamatan Sambi Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2), 51–59. <https://doi.org/10.53088/jikab.v1i2.8>
- Maria, E., Kristen, Wacana, S., & Halim, A. (2021). E-Government Dan Korupsi: Studi Di Pemerintah Daerah, Indonesia Dari Perspektif Teori Keagenan. *Ejournal.Stiesia.Ac.Id Maria, A Halimekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 2021*•*Ejournal.Stiesia.Ac.Id*. <https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2021.V5.I1.4789>

- Matia Andriani. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal Of Accounting, Finance, And Auditing, 1*(2). <https://doi.org/10.37673/Jafa.V1i2.323>
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis, 10*(1), 51–62. <https://doi.org/10.17509/Jimb.V10i1.15983>
- Pemerintah Provinsi Papua. (2022). *Data Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk*. Pemerintah Provinsi Papua. <https://www.papua.go.id/view-detail-page-205/data-luas-wilayah-dan-jumlah-penduduk.html>
- Priadana, S., & Sunarsi, D. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Экономика Региона*. Pascal Books.
- S Temalagi. (2022). Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Pulau-Pulau Aru. *Ojs3.Unpatti.Ac.Ids Temalagi, Rw Silooyaccounting Research Unit (Aru Journal), 2022•Ojs3.Unpatti.Ac.Id, 3*(1), 2774–6631. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/mutiara/article/view/6134>
- Sugiyono. (2007). Statistik Untuk Penelitian Dr Sugiyono. In *Statistika Untuk Penelitian* (P. 389).
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*.
- Susana, I. M., & Setianto, R. H. (2018). *Metode Penelitian Bisnis & Analisis Data Dengan Spss*. Erlangga.
- Tirande, D., Nirahua, S. E. M., & Toule, E. R. M. (2022). Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Pattimura Legal Journal, 1*(2), 133–150. <https://doi.org/10.47268/Pela.V1i2.6435>
- Vratiwy, I. (2019). *Pengertian Wawancara*. Academia.Edu. https://www.academia.edu/11325663/Pengertian_Wawancara?uc-g-sw=10030585
- Wafirotn, K., Bidang, U. S.-E. J. I., & 2019, Undefined. (2019). The Effect Of Transparency, Community Participation, And Accountability On Management Of Village Funds In Ponorogo Regency. *Journal.Umpo.Ac.Idkz Wafirotn, U Septiviastutiekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, 2019•Journal.Umpo.Ac.Id, 14*, 31–44. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ekuilibrium/article/view/1527/0>